

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam pesisir dan laut yang sangat besar, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang yaitu sekitar 81.000 km (Kristiyanti, 2016). Besarnya potensi sumberdaya alam kelautan yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia sangat strategis untuk dikembangkan dibidang wisata khususnya wisata di wilayah pesisir demi membangun perekonomian sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, yang tentunya dalam pengembangan wisata harus mengacu pada peraturan otonomi daerah dan kemandirian masyarakat lokal. Salah satu dari sumberdaya alam yang mendapat perhatian khusus di daerah pesisir yaitu ekosistem mangrove (Saputro, 2016).

Sekitar tiga juta *hektare* hutan mangrove berada di sepanjang 78.000 km wilayah pesisir Indonesia (Febriansyah *et al*, 2019). Ekosistem mangrove adalah ekosistem paling produktif di daerah pesisir subtropis dan tropis (Nagelkerken *et al.*, 2008). Ekosistem mangrove sendiri memiliki fungsi yang sangat vital di wilayah pesisir yaitu sebagai penunjang dan menstabilkan antara ekosistem darat dengan perairan disekitarnya yang dapat diartikan sebagai produsen primer (Pramudji, 2004). Ekosistem mangrove ini sangat berbeda dengan ekosistem lain yang berada di wilayah pesisir, komponen dasar dari rantai makanan yang terdapat di ekosistem mangrove yaitu serasah yang berasal dari tumbuhan mangrove seperti daun, ranting, buah dan batang. Serasah mangrove mengalami pembusukan menjadi detritus yang dapat mendukung keberlanjutan rantai makanan di ekosistem mangrove (Mahmudi *et al*, 2008). Oleh karena itu hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem dengan tingkat produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam fungsi baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kerusakan ekosistem mangrove dapat memicu terputusnya mata rantai makanan bagi kehidupan antara ekosistem mangrove dengan ekosistem lain maupun di dalam ekosistem itu sendiri (Agussalim dan Hartoni, 2014).

Luas garis pantai di Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki luas sekitar 2.165.71 Ha dan luas hutan mangrove di Bangkalan memiliki luas sekitar 354,05 Ha. Di Kecamatan Bangkalan sendiri luas hutan mangrove yaitu memiliki luas

sekitar 76,42 Ha (DKP, 2008). Dengan memiliki luas hutan mangrove yang cukup luas sangat disayangkan jika hutan mangrove tidak dijaga dan dimanfaatkan sebagai tempat wisata dengan tentunya harus memiliki keberlanjutan agar supaya yang nantinya dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar, khususnya Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Tentunya dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove perlu memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kepentingan dari segi ekonomi dan kelestarian lingkungan (Pattimahu *et al*, 2010).

Pemerintah Desa Ujung Piring ingin memanfaatkan PT. Adiluhung untuk membentuk suatu wisata dengan menggunakan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Direktur PT. Adiluhung sendiri juga memiliki rencana yang sama dengan pemerintah desa yaitu ingin membuat suatu wisata di Desa Ujung Piring. Pemerintah Desa Ujung Piring bekerjasama dengan Pelangi Ikan Nusantara (PIN) untuk membuat rancangan wisata. Rancangan wisata sudah dibuat dan telah terjadi kesepakatan antara pemerintah desa dan PIN.

Pemerintah daerah dalam melakukan komitmen rehabilitasi mangrove dengan melaksanakan penanaman satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan penanaman ini dilakukan rutin setiap tahunnya. Namun dalam perawatan dan pengawasan terhadap mangrove masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar Desa Ujung Piring tidak dilibatkan secara aktif, Sehingga cukup banyak mangrove yang baru ditanam mati.

Keberlanjutan ekosistem mangrove dalam penelitian ini memperhatikan beberapa sektor dimensi yaitu seperti, dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui status keberlanjutan suatu sumberdaya alam adalah *Rapid Appraisal for Fisheries* (RAPFISH) dengan pendekatan *multidimensional scalling* (MDS). *Rapid Appraisal for Fisheries* dapat menjelaskan keberlanjutan secara kuantitatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk mewakili dalam analisis numerik dengan sejumlah atribut yang telah diberi skor sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan (Wibowo *et al.*, 2015).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Bagaimana strategi evaluasi keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat batasan masalah sebagai berikut:

Penelitian ini berfokus pada menentukan status keberlanjutan dan strategi dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

## **1.4 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui status keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Menentukan rekomendasi strategi evaluasi keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

## **1.5 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang status keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi evaluasi keberlanjutan ekosistem mangrove di Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.